

BAB II : SEKITAR KELAHIRAN NAHDLATUL ULAMA

Latar Belakang dan Motivasi Berdirinya NU

Kelahiran jamiyah Nahdlatul Ulama, tidak bisa dipisahkan dengan situasi dan kondisi umat Islam pada saat dan sebelum organisasi ini lahir. Berdirinya Nahdlatul Ulama (kemudian disingkat dengan NU), lebih merupakan suatu jawaban konkret terhadap kondisi umat Islam pada waktu itu, yang dianggap kurang menguntungkan bagi kelangsungan hidup kelompok yang belakangan diberi julukan ''tradisional''. Yang dimaksud dengan kondisi dan situasi umat Islam pada waktu itu --yang kemudian mengharuskan kelompok tradisional untuk memberikan jawaban--, adalah keadaan umat Islam pada umumnya, baik di Indonesia maupun di negara Islam lainnya. Keadaan umat Islam Indonesia yang pada awal abad ke-20 ini masih berada di bawah penjajahan Belanda, ternyata juga ikut mempercepat proses kelahiran jamiyah yang disponsori pada ulama dan tokoh-tokoh pesantren ini.

Nahdlatul Ulama, memang tidak lahir dalam 'tabung steril' dan terpisah dari udara sekitarnya. Menurut Achmad Muchith Muzady, NU lahir di tengah dunia yang tengah bergolak, di tengah Indonesia yang juga bergolak, di tengah umat Islam yang sedang bergolak. Bahkan, NU dilahirkan di kota yang dinamis penuh pergolakan, yang kemudian disebut dengan Kota Pahlawan. Kelahiran organisasi ini, juga seiring dengan kelahiran organisasi-organisasi Islam lainnya, yang berdiri di tengah-tengah pergolakan di Indonesia, dalam

memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia. 1)

Seperti diketahui, bahwa pada tahun 1911 telah berdiri sebuah organisasi yang diberi nama Sarikat Dagang Islam (SDI). Sarikat ini merupakan perkumpulan saudagar muslim yang bertujuan untuk mengimbangi kemajuan-kemajuan orang Tionghoa Indonesia yang telah berhasil dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Serikat dagang ini, akhirnya juga bisa didayagunakan secara efektif oleh para pedagang muslim untuk membendung meluasnya pengaruh pedagang Cina terhadap pedagang pribumi. Oleh sebab itu, organisasi ini kemudian bisa berkembang secara cepat dan dapat mengorganisasikan diri secara efektif, untuk mengimbangi kemajuan pedagang Tionghoa.

Kemudian, pada tahun 1912 --atau setahun kemudian-- SDI berubah nama menjadi Sarikat Islam (SI). Setelah berganti nama menjadi SI, tentunya organisasi ini tidak mengkhususkan kegiatannya dalam bidang perekonomian dan perdagangan saja, melainkan berkembang dalam aspek keagamaan dan bahkan akhirnya melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik praktis.

'Perubahan lapangan kegiatan ini, terutama sekali dipengaruhi oleh kemajuan zending, sementara dari kalangan kaum muslimin tampak mengalami kemunduran'. 2)

-
- 1). Achmad Muchith Muzady, Majalah AULA September 1987 halaman 76 - 77.
 - 2). NU dan Politik Islam Dewasa Ini, Skripsi H. Bt. Achda, Universitas Nasional - Fakultas Ilmu Politik, 1984, halaman 32.

Kemajuan agama Nasrani itu, juga banyak dibantu oleh pemerintah kolonial Belanda dalam bidang moral, spiritual, dan finansial. Gubernur Jenderal Belanda waktu itu, A.W.F. Indurburg (1909-1916 M) secara tegas menyatakan, "Bahwa tetap dapat dipertahankannya tanah jajahan Indonesia, tergantung buat sebagian besar dari kristenisasi rakyat di sini".³⁾

Misi zending itu, ternyata juga giat membangun sekolah-sekolah dan rajin pula memperhatikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan, terutama yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat dan pembangunan suatu rumah sakit.

Sementara itu, Sarikat Islam, setelah berganti nama dan mengembangkan langkah kegiatannya, ternyata semakin maju dan berkembang pesat serta bisa tampil secara meyakinkan dalam arena politik Indonesia. Sebagai wadah pergerakan umat Islam, SI juga pernah mencatat masa keemasannya selama bergelut dalam bidang sosial keagamaan maupun dalam bidang politik. Akan tetapi, keberhasilan SI ini justru membuat pimpinan organisasi ini terlena dengan kemajuan yang berhasil diraih, yaitu dengan menyusupnya kelompok komunis ke dalam tubuh organisasi ini.

Meski perbedaan pendapat dan kericuhan yang terjadi dalam tubuh SI yang dengan sengaja diciptakan komunis itu akhirnya bisa dihindari, namun ternyata masih membawa akibat

3). Rosihan Anwar, Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia, PT. Kartika Tama Jakarta, 1971, halaman 23.

yang cukup merisaukan. Kepercayaan masyarakat dan khususnya umat Islam terhadap organisasi ini, semakin menipis. Sebab, SI akhirnya menjadi organisasi yang tidak Islami lagi, tapi malah bergeser menjadi organisasi yang nasionalis dan -- bahkan-- komunis.

Pengaruh Islam memang masih bisa dirasakan dalam tubuh SI. Akan tetapi, warna sosialis dan nasionalis ternyata lebih dominan. Persaingan antar pemimpin di dalam tubuh SI juga semakin meruncing, terutama antara SI Merah yang condong ke komunis dengan SI Putih yang berdasarkan Islam, sosialisme, dan nasionalisme.⁴⁾ SI Merah merupakan cikal-bakal Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kemudian berkembang dan berdiri sebagai partai tersendiri, dan ikut meramaikan politik di Indonesia.

Satu tahun setelah berdirinya SDI yang disponsori oleh H.Samanhudi yang kemudian berubah naman menjadi Sarikat Islam, maka kemudian di Yogyakarta, KH. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Kemudian, pada tahun 1914 berdiri lagi organisasi Al-Islam Wal-Irsyad di Jakarta, pada tahun 1923 berdiri Persis (Persatuan Islam) di Bandung, dan tidak lama lagi berdiri Persatuan Oemat Islam di Majalengka. Semua organisasi itu, berdasarkan ajaran Salaf dan Reform.⁵⁾

Dari beberapa organisasi yang digolongkan reformis

4). AK. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Dian Rakyat Jakarta, 1970, hal. 83.

5). L. Stoddard, Dunia Baru Islam, hal. 306

itu, hanya Muhammadiyah yang paling berpengaruh dan punya banyak anggota. Bahkan, Muhammadiyah akhirnya merupakan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, di samping Nahdlatul Ulama. "Sebab, Muhammadiyah merupakan organisasi yang paling banyak pengikutnya, mempunyai organisasi yang teratur, dan gigih dalam memperjuangkan pendiriannya. 6)

KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, sejak kecil memang dikenal sebagai anak yang cerdas dan gemar mempelajari agama Islam. Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 dengan nama Muhamad Darwis, putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, khatib di Masjid Sultan Yogyakarta. Dahlan menghayati cita-cita pembaruan sekembali dari pergi haji yang pertama.

KH. Ahmad Dahlan, yang dikenal sebagai tokoh reformis itu, melalui organisasi Muhammadiyah telah berbuat banyak, baik pada awal berdirinya organisasi itu maupun dalam perjalanan berikutnya.

Deliar Noer kemudian menggambarkan, "Ia (Dahlan) mulai mengintrodusir cita-citanya itu, mulanya dengan mengubah arah orang bersembahyang kepada kiblat yang sebenarnya (sebelum ini, biasanya arah sembahyang mengarah ke Barat)". 7)

Perjalanan hajinya yang kedua ke Tanah Suci pada tahun 1909, telah banyak dimanfaatkan Dahlan untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam. Ide-ide pembaruan yang kemudian dilancarkan oleh Dahlan itu, tidak bisa diketahui

6). L. Stoddard, *Dunia Baru Islam*, hal. 307

7). Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* LP3ES Jakarta, 1979, hal. 85.

secara pasti dari mana salnya dan bagaimana dia mulai memperkenalkan ide pembaruan itu. Namun, H. BT. Achda, dalam skripsinya memperkirakan, bahwa ide itu bermula dari pengaruh buku-buku yang dibaca oleh Dahlan, terutama pada waktu dia menunaikan ibadah haji yang kedua.

'Dahlan, agaknya banyak terpengaruh dengan buku-buku yang dikarang oleh Muhamad Abduh dan Ibnu Taimiyah, serta beberapa artikel yang ditulis dalam majalah 'Urwatul Wutsqo' yang dipimpin oleh Syekh Jamaludin Al-Afghani serta Tafsir Al-Mannar yang dikarang Rasyid Ridlo, murid dari Muhamad Abduh'. 8)

Pada tahap berikutnya, Muhammadiyah di bawah pimpinan KH. Ahmad Dahlan mulai mengadakan pembaruan-pembaruan untuk memurnikan ajaran Islam, terutama dalam praktek ibadah dan kemurnian keyakinan. Dahlan memulai kegiatan di sekitar tempat tinggalnya, yakni di Kauman Yogyakarta. Ia bersama teman-temannya mulai mengadakan pengajian-pengajian agama Islam, merintis pendirian sekolah, dan usaha-usaha lain yang berfokus pendidikan.

Usaha perubahan juga mulai dilakukan oleh Dahlan, khususnya untuk mengubah arah kiblat masjid Sultan. Namun, keinginan Dahlan itu ternyata gagal dan tidak mendapat tanggapan positif dari pengurus masjid serta umat Islam di sekitar Kauman. Ia kemudian membangun langgar sendiri dengan meletakkan kiblat yang tepat seperti yang diinginkan. Tetapi, perubahan itu ternyata tidak disenangi oleh KH. Muhamad Khalil, yang kemudian memerintahkan untuk membinasakan langgar itu.

8). H. Bt. Achda, Op. Cit. hal. 27 - 28.

Dahlan kemudian patah hati, sehingga ia berkeputusan untuk meninggalkan kota kelahirannya. Tapi untunghlah, seorang anggota keluarganya berhasil menghalangi niat Dahlan, yang kemudian membangunkan sebuah langgar baru untuk Dahlan.

Perubahan-perubahan yang dilakukan Dahlan pada awal perjuangannya, menurut Deliar Noer, memang sangat kecil artinya kalau diukur dari sekarang. Akan tetapi, hal itu berarti telah menunjukkan kesadaran seorang Dahlan tentang perlunya membuang kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dan yang menurut pendapatnya memang tidak sesuai dengan Islam. Perubahan-perubahan semacam itu, kata Delair Noer, memang tidak perlu datang dari pengaruh orang lain, sebab kaum tradisi (dan kitab-kitab mereka juga) mengakui, bahwa kiblat haruslah menuju Ka'bah, dan bahwa seorang muslim haruslah bersih dari segala kotoran.

'Masalahnya adalah, apakah praktek sama dengan teori, dan dalam hal ini, dengan teori yang mudah didapat dalam kitab-kitab tradisi,' demikian menurut Deliar Noer. 9)

Aktifitas Muhammadiyah kemudian berkembang dalam bidang-bidang pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial, Muhammadiyah memelopori dan menyelenggarakan sejumlah pembaruan dan inovasi. Muhammadiyah menganggap pendidikan sebagai peningkatan kemampuan dan pemikiran para anggotanya dalam memahami Islam, dan terutama dalam mewariskan pola pemikiran yang berdasarkan Al Qur'an dan Hadits kepada

9). Deliar Noer, Op. Cit. hal. 85

generasi berikutnya. Semboyan Muhammadiyah yang berbunyi kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah Nabi serta membuka lebar-lebar pintu ijtihad. Demikian semboyan yang selalu didengungkan dan disebarluaskan Muhammadiyah kepada umat Islam.

Berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912, selain membawa suasana baru dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, juga merangsang timbulnya dialog dan diskusi-diskusi masalah keagamaan di kalangan tokoh umat Islam, khususnya tokoh-tokoh mudanya. Sebuah forum diskusi, kemudian didirikan dengan diberi nama Tashwirul Afkar (Potret Pemikiran) di Surabaya. Dalam wadah ini, bergabung dua orang tokoh yang datang dari dua 'aliran' yang berbeda, yaitu KH. Wahab Chasbullah dari kalangan tradisional dan KH. Mas Mansur dari kelompok modernis.

Dalam wadah Tashwirul Afkar itu, diperbincangkan dan didiskusikan berbagai masalah agama dan praktek-praktek keagamaan yang banyak dilakukan oleh umat Islam pada waktu itu. Meski kedua kubu (kalangan pesantren yang disebut dengan kelompok tradisional diwakili KH wahab Chasbullah dan tokoh Muhammadiyah yang dikenal sebagai modernis yang diwakili KH Mas Mansyur) saling berdebat dalam praktek keagamaan, namun mereka pada umumnya tetap menjadi pendukung SI (Sarekat Islam).

'Hal itu disebabkan Sarekat Islam tidak menyentuh soal-soal yang berhubungan dengan pembaruan dalam konsep-konsep keagamaan. Para pemimpin Sarekat Islam lebih tertarik dengan aktifitas politik (political acitivism). Karena memang tujuan utama SI adalah untuk mempersatukan kelompok

Islam Indonesia, maka pemimpin SI selalu menekankan agar perbedaan pendapat menyangkut detail praktek keagamaan dihindari.' 10)

Walaupun pemimpin Sarikat Islam telah mengimbau agar tokoh-tokoh modernis dan tradisional tidak memperdebatkan masalah-masalah khilafiyah, masalah furu' (cabang) dalam agama, serta masalah amaliah lainnya seperti ziarah ke kubur, doa qunut, selamatan, tahlilan, pembacaan barzanji dan lain-lain, namun kedua kubu masih saja tidak bisa menghindari sentuhan-sentuhan terhadap masalah yang sebenarnya tidak prinsipal itu.

Hal di atas, juga diakui oleh Dr. Deliar Noer, bahwa kecaman yang dilancarkan oleh kelompok pembaru terhadap golongan tradisi, lebih bersangkut paut terhadap masalah furu', karena bid'ah memang menyangkut hal-hal yang detail bukan prinsip.

'Oleh karena pengikut Sarikat Islam lebih mengutamakan persatuan antara sesama muslim, maka mereka berpendapat bahwa menghangatkan pembicaraan tentang masalah furu' hanya akan menghasilkan pertikaian dan perdebatan yang tidak berkesudahan, dan oleh sebab itu akan memecah dan melemahkan masyarakat Islam.' 11)

Kalau konflik atau perbedaan pendapat antara kaum pembaru dan kaum tradisi tidak dibawa-bawa ke dalam Sarikat Islam, maka dalam forum-forum lainnya konflik itu masih saja terjadi. Perbedaan persepsi dalam pengamalan ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan masalah yang tidak prinsip, merangsang adanya persaingan tajam antara mereka dalam

10). Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren, LP3ES Jakarta, 1982, hal. 97.

11). Deliar Noer, Op. Cit. hal. 258

merebut simpati umat. Misalnya dalam forum 'Kongres Umat Islam' yang disponsori SI sebagai upaya penggalangan persatuan dan kesatuan umat Islam, pada mulanya memang bisa berjalan baik, karena kedua kelompok itu bisa berdampingan untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam pada waktu itu. Tetapi, kongres itu akhirnya berjalan alot dan menjadi ajang perbedaan pendapat bagi kelompok pembaru dan kelompok tradisi.

"Kongres umat Islam yang pertama diadakan pada 31 Oktober sampai 2 November 1921 di Cirebon, Jawa Barat. Penyelenggaraan kongres itu sangat menarik perhatian umat Islam, karena akan membicarakan hal-hal yang bersifat politis dan juga permasalahan umat Islam yang sedang berkembang, termasuk juga masalah khilafiyah. Namun, masalah yang terakhir itu tidak bisa dituntaskan dalam forum itu, tapi juga masih beruntung bahwa masalah furu' itu berkembang secara melebar sehingga tidak mengganggu jalannya kongres''. 12)

Kongres-kongres serupa, juga terus diselenggarakan oleh umat Islam untuk membahas permasalahan umat yang sedang berkembang serta untuk mencari jalan keluar yang paling baik bagi umat Islam.

- Tahun 1922 kongres yang kedua diadakan di Kota Garut
- Tahun 1924 kongres ketiga diadakan di Surabaya
- Tahun 1925 kongres keempat di Yogyakarta
- Tahun 1926 kongres kelima diadakan di Bandung
- Tahun 1926 diadakan kongres serupa di Surabaya dan pada bulan Desember tahun yang sama juga diadakan lagi kongres di Bogor.

12). Maksoem Machfoedz, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama, Yayasan Kesatuan Umat, Surabaya, 1982, hal. 23-24.*

Selain perkembangan yang terjadi dalam diri umat Islam Indonesia dan situasi negara Indonesia pada umumnya, ternyata pada tahun 1920-an telah pula terjadi perkembangan yang cukup mendasar di Kota Hijaz, Makkah, Saudi Arabia. Tepatnya pada tahun 1924, Abdul Aziz bin Saud dengan semangat ajaran Wahabinya, telah berhasil menumbangkan rezim Syarif Hussein di Makkah. Keberhasilan Ibnu Saud tampil dalam pemerintahan tertinggi di Saudi Arabia itu, jelas mempunyai pengaruh yang cukup luas bagi dunia Islam, termasuk juga di Indonesia. Peristiwa itu, bukan saja merupakan pergantian penguasa yang terjadi dalam suatu pemerintahan, tapi telah membawa pengaruh yang cukup mendasar dalam kehidupan keagamaan di dunia Islam.

Menurut Deliar Noer, kemenangan kaum Wahabi di Makkah itu dilanjutkan usaha-usaha nyata dengan melakukan pembersihan dalam kebiasaan praktek beragama sesuai dengan ajarannya, walau Ibnu Saud tidak melarang pelajaran madzhab di Masjidil Haram. Tindakannya itu, sebagian memang mendapat sambutan baik di Indonesia, tetapi sebagian lainnya ditolak. Kemenangan Ibnu Saud itu, merupakan kemenangan kelompok Wahabi. 13)

Perkembangan di Saudi Arabia yang jelas-jelas dikuasai oleh kelompok pembaru, tidak saja ingin membentuk suatu negara yang Islami, tapi juga ingin menyebarkan paham Wahabi ke seluruh dunia, termasuk juga ke Indonesia yang memang sudah terkena rembesan paham itu. Pemerintah Ibnu Saud, adalah penganut setia aliran Wahabi, suatu aliran dan gerakan keagamaan yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang tokoh agama yang dilahirkan di Uyainah, Najd

13). Deliar Noer, Op Cit, halaman 242 - 243

pada tahun 1703.

Muhammad bin Abdul Wahab, dikenal sebagai tokoh yang punya kemauan keras dan radikal dalam sikap dan pendiriannya. Ajaran Wahabi, mulai disebarakan pada tahun 1740 di Kota Uyainah, dengan cara-cara yang sesuai dengan sikap perintisnya ayang dikenal cukup radikal dan menggunakan 'jalur keras'. Cara-cara inilah yang kemudian tidak disenangi oleh penguasa Uyainah, Amir Alhasa, sehingga dia memerintahkan pendiri Wahabi itu pergi meninggalkan kota kelahirannya. Muhammad bin Abdul Wahab, akhirnya pergi ke Dar'iyah, sebuah negeri yang kebanyakan penduduknya sudah tertarik dengan ajarab Wahabi.

Melalui berbagai perjuangan yang cukup berat, aliran Wahabi akhirnya menemukan tempat pijak dan tempat berkembang di Hijaz. Aliran ini, memang kemudian mendapat tempat yang strategis dalam pemerintahan Ibnu Saud, dan bahkan akhirnya diproklamasikan sebagai ajaran resmi oleh pemerintah.

Setelah mendapat pijakan yang kuat dengan mendapat dukungan penuh dari pemerintah Arab Saudi, perkembangan aliran dan pemikiran model Wahabi memang cukup pesat. Maka, bersamaan dengan itu muncul pula tindakan-tindakan yang radikal, terutama dalam mengamalkan ajaran agama. Segala sesuatu yang dianggap bid'ah dan menyebabkan orang Islam menjadi syirik, secara spontan dimusnahkan. Penganut aliran ini, --dengan mendapatkan dukungan dari aparat pemerintah-- langsung mengadakan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan, makam, dan benda-benda yang dianggap keramat, yang

dianggapnya membuat orang bisa syirik. Bahkan, makam Nabi Muhammad dan keluarganya, para sahabat (khususnya makam Abu Bakar dan Umar), yang terletak di sekitar Masjid Nabawi pun juga pun akan dibongkar dan dimusnahkan. Mereka berkeinginan, agar bangunan-bangunan seperti itu tidak dikultuskan oleh umat Islam, karena dikhawatirkan bisa mempengaruhi iman mereka.

Bersamaan dengan berkembangnya aliran Wahabi di Arab Saudi, pada waktu itu berkembang pula polemik mengenai masalah khilafat (sistem pemerintahan) menurut ajaran Islam.

'Gebrakan Mustafa Kamal di Turki, sempat pula mengguncangkan dan bahkan mengancam kekuasaan Sultan Turki yang pada waktu itu dianggap sebagai khalifah. Dan , pada tahun 1924, kesultanan Turki pada akhirnya tumbang yang kemudian digantikan oleh kelompok nasionalis, dengan mengambil bentuk negara republik.' 14)

Perkembangan baru di Turki itu, cukup menarik perhatian dunia Islam. Maka, pemerintah Mesir, pada waktu itu berkeinginan untuk menyelenggarakan kongres khilafat.

'Gema kongres khilafat itu memang sampai juga di negara-negara lain yang penduduknya mayoritas beragama Islam, termasuk juga di Indonesia. Untuk menyambut kongres khilafat di Mesir itu, di Indonesia dibentuk sebuah tim kongres khilafat, dengan menunjuk Wondo Amiseno dari Sarekat Islam dan KH. Wahab Chasbullah dari Tashwirul Afkar masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua. Delegasi yang hendak diutus menghadiri kongres khilafat itu, adalah KH. Wahab Chasbullah, Haji Fachruddin dari Muhammadiyah, dan Surjopranoto dari Sarekat Islam'. 15)

Kongres khilafat di Kairo, Mesir itu akhirnya ditunda. Maka dari itu, perhatian tokoh-tokoh Islam kemudian beralih

14). H. Bt. Achda, Op. Cit. hal. 37

15). Deliar Noer, Op. Cit. hal. 242

ke kongres yang sama yang diadakan di Saudi Arabia oleh Raja Ibnu Saud. Indonesia, termasuk salah satu negara yang diundang untuk menghadiri kongres khilafat itu. Maka, gema kongres itu segera mewarnai kehidupan umat Islam Indonesia, khususnya dalam pertemuan maupun rapat-rapat yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi Islam di Indonesia.

Bahkan, adanya undangan menghadiri kongres yang akan membahas masalah sistem pemerintahan Islam dan berbagai masalah keagamaan yang kala itu sedang berkembang, sempat pula mewarnai kegiatan kongres umat Islam Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 21 - 17 Agustus 1925 dan kongres serupa pada 6 Februari di Bandung. Dalam kongres umat Islam di Bandung yang hanya berjalan satu hari saja itu, memang akhirnya berhasil menetapkan keputusan rapat organisasi-organisasi pembaru satu bulan sebelumnya di Cianjur.

Kalau dilihat dari penetapan keputusan dalam kongres yang terakhir itu, memang hanya menguntungkan kelompok pembaru, yang punya kemauan keras untuk menghadiri kongres khilafat di Saudi Arabia itu. Sedangkan kelompok tradisi, sama sekali tidak diuntungkan oleh kongres di Bandung itu, lantaran semua utusan yang akan berangkat ke kongres khilafat hanya terdiri dari kelompok pembaru saja, yaitu KH. Mas Mansur dari Muhammadiyah dan Cokroaminoto dari Sarekat Islam.

Kelompok tradisional, yang dalam kongres umat Islam di Bandung mengutus KH. Wahab Chasbullah, hanya bisa

'menitipkan' usul untuk dibawa ke Makkah. Paket usul tersebut antara lain, agar praktek-praktek keagamaan yang selama ini dilaksanakan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia, seperti membaca doa qunut, ziarah qubur, membaca dala'il khairat, ajaran madzhab, dan lain-lain, supaya tetap dihormati dan dihargai oleh kepala negara yang baru di Arab Saudi. Sebab, Raja Ibnu Saud dikenal sebagai penganut aliran Wahabi yang radikal dalam melaksanakan ajaran Islam. Segala bentuk bid'ah dan tradisi yang berkembang di kalangan umat Islam, raja yang baru itu akan berusaha keras untuk memusnahkannya.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa sebenarnya KH. Wahab Chasbullah adalah wakil ketua komite kongres khilafat yang akan menghadiri kongres di Makkah. Akan tetapi, lantaran paket usul kelompok tradisional itu tidak mendapat sambutan yang semestinya dari kalangan reformis, maka KH. Hasyim Asy'ari, --seorang tokoh ulama dari kelompok tradisi yang kemudian dikenal sebagai pendiri organisasi Nahdlatul Ulama-- menyarankan kepada Wahab Chasbullah dan kawan-kawannya untuk mengundurkan diri saja dari kepanitiaan komite itu.

'Kemudian, Wahab mengambil inisiatif untuk mengadakan perembukan sendiri dengan ulama-ulama dari Surabaya, Pasuruan, Jember, Semarang, Lasem, dan Pati. Dalam musyawarahnya, mereka bersepakat untuk membentuk panitia yang disebut dengan 'Komite Hijaz'. 16) 'Langkah yang diprakarsai Wahab itu, mendapat sambutan hangat dari kalangan ulama lain di Jawa. Sehingga, pada 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan 16 Rajab 1334 H, mereka

16). Ibid, hal. 243

berkumpul di rumah KH Wahab Chasbullah di Kampung kertopaten Surabaya untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kongres khilafat di Makkah itu''. 17)

Dalam pertemuan di Surabaya itu, hadir tokoh-tokoh ulama tradisional dari berbagai kota besar di Jawa. Mereka itu antara lain KH. Hasyim Asy'ari dari Tebuireng Jombang, KH. Bisri Syamsuri dari Tambak Beras Jombang, Raden Asnawi dari Kudus, KH. Ma'shum dari Lasem, KH. Ridlwan dari Semarang, Nawawi dari Pasuruan, Abdul Ubaid dari Surabaya, Alwi Abdul Aziz dari Malang, H. Abdul Halim dari Cirebon, H. Ngoro Muntaha dari Madura, dan H. Abdullah Fagih dari Gresik, dan lain-lain.

Rapat para ulama di Surabaya itu, antara lain berhasil menelorkan dua keputusan penting yang mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi, yaitu :

1. Meresmikan dan mengukuhkan berdirinya 'Komite Hijaz' dengan masa kerja sampai delegasi yang diutus untuk menemui Raja Ibnu Saud berhasil kembali ke tanah air.
2. Membentuk jamiyah (organisasi) sebagai wadah persatuan para ulama dalam tugasnya memimpin umat menuju 'Izzul Islam wal-Muslimin'.

Atas usul dari Alwi Abdul Aziz, jamiyah itu diberi nama 'Nahdlatul Ulama', artinya kebangkitan ulama. 18)

Dalam rapat yang berlangsung cukup sukses itu,

17). Saifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, PT. Al Maarif Bandung, hal. 609.

18). Saifuddin Zuhri, KH. Wahab Chasbullah, Bapak dan Pendiri NU, Jakarta, Yamanu, 1972, hal. 26.

--seperti item keputusan pertama-- telah ditetapkan KH.Wahab Chasbullah dan Syekh Ahmad Genaim Al Mishry sebagai delegasi yang akan menghadap Raja Ibnu Saud di Makkah, Saudi Arabia. Tugas pokok delegasi itu, adalah untuk menyampaikan tuntutan kelompok tradisional, agar ajaran Madzahibil Arba'ah (Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi) tetap dihormati. Raja Ibnu Saud, dalam surat balasannya, menyatakan menyambut baik permintaan delegasi tersebut dengan menjanjikan akan tetap menjamin dan menghormati ajaran-ajaran empat madzhab dan paham Ahlussunnah wal-Jama'ah di seluruh tanah Arab.

Sedangkan keputusan yang kedua (membentuk organisasi sebagai wadah persatuan para ulama), akhirnya merupakan tonggak sejarah yang penting bagi Nahdlatul Ulama. Sebab, dari wadah yang diberi nama Nahdlatul Ulama itulah kemudian menjadi sebuah organisasi besar yang dipimpin para ulama dan kalangan pesantren.

Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berhasil disusun dalam rapat 31 Januari 1926 itu, adalah sebagai berikut :

I. AL HAI'AH AS-SYURIAH (DEWAN TERTINGGI KEAGAMAAN)

Rois Akbar : KH. Hasyim Asy'ari, Jombang
 Wakil Rois Akbar : Syekh Amin bin Abdussyukur, Surabaya
 Katib : Syekh Alwi bin Abdul Aziz, Surabaya
 Wakil Katib : Syekh Abdul Halim, Surabaya
 Mustasyar : Syekh Muhammad Abdul Alim As-Sidiqi

ditarik suatu kesimpulan bahwa kelahiran NU merupakan suatu jawaban terhadap gerakan keagamaan yang terjadi di Indonesia maupun di Timur Tengah, terutama terhadap kongres-kongres khilafat yang dilaksanakan di Hejaz.

Seperti diketahui, gerakan keagamaan radikal yang lebih dikenal dengan gerakan Wahabi itu, bertujuan untuk mengembalikan semua urusan agama, politik, dan sosial kepada sumbernya yang asasi, yaitu Alquran dan Hadits. Dan, gerakan yang kemudian meluas sampai ke Indonesia itu, memang hanya mengembalikan segala permasalahan kepada dua 'pusaka' itu, sehingga kadang menimbulkan kontra gerakan dari kaum muslimin lainnya, yang waktu itu masih lazim menggunakan hasil-hasil pemikiran para ulama dan imam, yang lebih dikenal imam madzhab.

Gerakan kelompok Wahabi ini, lebih memberikan tempat kepada hasil ijtihad yang dilakukan oleh orang Islam, daripada hasil pemikiran yang sudah pernah dihasilkan oleh para imam madzhab (Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali). Bahkan, hasil pemikiran para imam itu dianggap sebagai bahan pembandingan saja kalau memang dianggap perlu, yang boleh ditinggalkan sama sekali oleh para mujahid. Gerakan Wahabi ini, bahkan membebaskan semua pengikutnya untuk melakukan ijtihad dan menggali hukum secara sendiri.

Kalau gerakan ini mengharuskan pengikutnya untuk menggali hukum sendiri secara bebas, tapi NU malah mempunyai pendirian yang sebaliknya. Oleh sebab itulah, maka Nahdlatul

Ulama dengan sengaja mengirim utusannya untuk menemui penguasa baru di Hejaz, yaitu Raja Ibnu Saud, untuk menyampaikan pendiriannya bahwa NU menghendaki agar para penganut madzhab empat masih diberikan kebebasan. Dengan kata lain, NU menganggap hasil ijtihad yang dilakukan oleh para imam itu masih sangat relevan dan masih sesuai dengan zaman.

Karena Nahdlatul Ulama mempunyai pendirian seperti tersebut di atas, maka organisasi yang punya tanda gambar bumi dilingkari tampar itu, seringkali dijuluki sebagai jamiyah yang 'tradisional', 'konservatif', 'kolot', dan sebagainya. Memang, jamaah (masyarakat) NU sampai sekarang masih terus mengikuti hasil-hasil ijtihad para imam, meski organisasi ini tidak menutup kemungkinan para anggotanya melakukan ijtihad sendiri. NU, bukan berarti tidak mengakui sumber pokok ajaran Islam ada dua pusaka yang diwariskan oleh Nabi Muhammad itu, yaitu Alquran dan Hadits, tapi menurut keyakinannya, umat Islam pada umumnya masih belum mempunyai kemampuan yang cukup untuk melakukan ijtihad sendiri, seperti yang didengung-dengungkan oleh kelompok Wahabi.

Nahdlatul Ulama mempunyai pendirian, bahwa tidak setiap orang Islam mampu melakukan ijtihad sendiri. Sebab, seorang mujahid harus memiliki kualifikasi tertentu dalam bidang keilmuan. Agar tidak terjadi penyimpangan terhadap hasil ijtihad itu --khususnya bagi orang-orang yang belum mampu dan belum memenuhi persyaratan-- maka pengkajian itu

harus melalui tafsiran-tafsiran yang sudah dihasilkan oleh para ulama terdahulu. Akan tetapi, begitu seseorang telah dianggap mampu dan dapat menguasai metodologi ijtihad serta syarat-syaratnya maka boleh saja dia mengkaji hukum Islam secara langsung dari sumbernya, yaitu Alquran dan Hadits.

Oleh karena sistem pemahaman terhadap ajaran Islam yang demikian itulah, maka kedudukan madzhab sebagai salah satu sistem pemahaman terhadap ajaran Islam, menjadi begitu penting. Sehingga, wajar saja kalau kelahiran organisasi ini juga banyak dimotivisir oleh kepentingan-kepentingan semacam itu, seperti yang dilakukan oleh NU pada saat mengirim utusan ke Raja Arab Saudi itu. Sistem pemahaman ajaran Islam semacam ini, seperti yang berkembang di kalangan NU sampai sekarang ini, bukan berarti NU lantas mengenyampingkan Alquran dan Hadits sebagai sumber pokok ajaran Islam.

Kalau ada yang menganggap bahwa NU menutup pintu ijtihad, hal itu juga bukan berarti kebebasan orang Islam untuk menggali hukum secara langsung dari sumber utamanya, telah tertutup sama sekali. Bagi orang yang mampu dan memenuhi persyaratan, bisa saja seseorang melakukan ijtihad. Akan tetapi, bagi orang awam dan tidak memenuhi syarat, memang tidak diperbolehkan melakukan ijtihad.

Pada prinsipnya, Nahdlatul Ulama masih memberikan kebebasan kepada orang-orang Islam yang mampu untuk melakukan ijtihad sendiri. Pintu ijtihad bagi mereka masih tetap terbuka dan terus terbuka. Seperti pendapat yang dikeluarkan oleh KH. Wahab Chasbullah ketika menjawab

sejumlah tuduhan yang dialamatkan kepada NU. Dia mengatakan, "NU tidak sependapat dengan Muhammadiyah, bahwa pintu ijtihad tetap terbuka sebebaskan-bebasnya. Sungguh pun demikian, bukan berarti setiap orang harus bertaklid". 20)

Dua tokoh muda Islam, yang belakangan ini banyak melahirkan buku-buku ilmiah tentang Islam, mempunyai pendapat yang cukup menarik tentang NU.

Dr. Zamahsyari Dzofir menganggap bahwa jamiyah NU merupakan manifestasi modern dari kehidupan keagamaan, sosial, dan budaya para kiai. 21) Sedangkan Dawam Rahardjo menyebut, bahwa langkah NU merupakan pembaruan terhadap aspirasi dan realitas sosial masyarakat Islam ketika itu. 22)

Gerak maju akibat kelahiran Nahdlatul Ulama, menurut Dawam bisa dilihat dari, pertama, terbukanya komunikasi masyarakat Islam dengan dunia luar dan kemampuannya menciptakan antisipasi terhadap masalah-masalah nasional maupun internasional. Kedua, terjadi proses pembaruan dalam usaha-usaha pendidikan Islam melalui pengaruh para kiai. Ketiga, andil NU yang sangat besar terhadap perawatan dan pengembangan nilai-nilai nasional dan warisan budaya bangsa. Sedangkan yang keempat, berpedomannya NU terhadap ijmak dan qiyas selain Alquran dan Hadits, berarti NU telah meletakkan diri pada dasar pijak yang rasional.

Dawam Rahardjo beranggapan, bahwa keberanian NU untuk berpegang kepada sistem pengkajian hukum melalui ijmak dan qiyas ini, memang sangat menarik.

-
- 20). Ahmad Mansur Suryanegara, Gerakan Langkah Jamiyah dalam Partai Politik Nahdlatul Ulama, Jakarta, dalam Majalah Panji Masyarakat Nomer 336, 1981, halaman 43.
 21). Zamahsyari Dzofir, Op Cit, hal 7
 22). Dawam Rahardjo, Risalah Nahdlatul Ulama, No V/VI tahun 1979, hal 9.

'Ijmak menurut pemahaman saya, adalah penafsiran ajaran Islam oleh ahlinya dengan jalan musyawarah. Ini merupakan jaminan mutu yang bukan main. Sedangkan qiyas sebagai suatu metode berpikir yang identik dengan analogi, keistimewaannya karena ia merupakan cara menafsirkan ajaran, sesuai kebutuhan waktu dan tempat.' 23)

Gerakan Jamiyah Nahdlatul Ulama yang banyak memberikan toleransi kepada berkembangnya suatu pemikiran dan budaya tertentu, memang banyak menarik simpati dari sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. Adalah tidak berlebihan, kalau ada sementara pihak yang menganggap NU lebih apresiatif dalam mengembangkan ajaran Islam, sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial pada waktu itu. Menurut Slamet Effendy Yusuf, sikap NU yang demikian itu, menyebabkan organisasi ini mendapat 'pasaran' di masyarakat. Sama dengan apa yang dilakukan oleh para Walisanga, penyebar Islam pertama di Jawa, NU memang membiarkan amal kebudayaan yang ada tetap hidup dalam masyarakat, seraya mengisi dengan ruh dan semangat ajaran Islam. 'Inilah merupakan salah satu sumber kekuatan NU, sehingga kebangkitan ulama yang ditandai dengan kelahiran NU ini, tidak berhadapan dengan budaya yang ada dalam masyarakat, tetapi menyatukan aspirasi kebudayaan dengan aspirasi keislaman', demikian tegas Slamet Effendy Yusuf, yang juga dikenal sebagai tokoh muda NU itu. 24)

Nahdlatul Ulama, yang memilih nama sebagai 'kebangkitan ulama', memang merupakan organisasi yang menempatkan para ulama pada posisi yang sangat penting dan menentukan sekali dalam struktur organisasinya. Hal ini jelas berbeda dengan organisasi pada umumnya di Indonesia,

23). Ibid, halaman 9.

24). Slamet Effendy Yusuf, *Dinamika Kaum Santri*, Jakarta, CV Rajawali, 1983, hal 31

seperti misalnya Muhammadiyah atau organisasi Islam lainnya.

'NU menempatkan ulama pada kedudukan yang vital, dan memilih mereka sebagai kekuatan sentralnya. Hal ini sangat sesuai dengan namanya, yang berarti kebangkitan ulama'', kata KH. Achmad Shiddiq, Rais Aam PBNU, kepada penulis ketika menghadiri muktamar NU di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asembagus, Situbondo, akhir Desember 1984. (Pendapat yang demikian itu juga bisa dibaca dalam buku Khittah Nahdliyah halaman 13 yang ditulis oleh Akhmad Shiddiq).

Kedudukan para ulama yang begitu penting dalam organisasi ini, juga dicerminkan dalam ketentuan bahwa sembilan pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) haruslah terdiri dari ulama. Dan, para pengurus yang non-ulama, lebih merupakan anggota eksekutif yang sepak terjangnya selalu diawasi oleh pengurus ulama.²⁵⁾ Bahkan, dalam muktamar NU di Situbondo, juga diputuskan struktur jamiyah NU masih ditambah lagi dengan Majelis Mustasyar di semua tingkatan kepengurusan NU, yang bertugas untuk memberikan nasehat kepada pimpinan NU, baik diminta atau tidak. Majelis ini, terdiri dari para ulama yang berpengaruh.

Menurut Slamet Effendy Yusuf, penempatan para ulama pada urutan pertama dalam organisasi NU, didasarkan kepada : Pertama, sebagai organisasi keagamaan, NU harus memilih kekuatan sentralnya pada tokoh-tokoh yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral, ilmu, amal, dan akhlaq keagamaannya. Ulama yang dalam Hadits disebut sebagai pewaris nabi-nabi dan dalam Alquran disebut sebagai yang takut pada Allah, tentulah yang paling mendekati tuntutan

25). Deliar Noer, Op. Cit, halaman 252.

tersebut.

Kedua, seorang ulama yang paling kecil lingkup pengaruhnya pun selalu mempunyai kewibawaan. Dan pengaruh itu biasanya mampu menembus tembok-tembok organisasi, kedaerahan, atau bahkan lebih luas lagi. ²⁶⁾

Ulama, dalam struktur kepengurusan NU memang mempunyai kedudukan yang istimewa. Bahkan, ulama menempati dua jabatan dalam struktur kepengurusan NU, baik di pusat maupun di desa-desa, yaitu dalam jabatan Syuriah dan Majelis Mustasyar. Syuriah bertindak sebagai penasehat Tanfidziyah, dan Mustasyar sebagai dewan pertimbangan yang akan dimintai pertimbangan oleh pengurus dalam hal-hal yang penting. Bahkan, Mustasyar juga diberi kewenangan untuk memilih dan melengkapi susunan pengurus, baik Syuriah maupun Tanfidziyah. ²⁷⁾ Ini bisa dibuktikan dalam muktamar NU di Pesantren Asembagus Situbondo, Desember 1984 lalu.

Segala kegiatan kepengurusan NU, memang dikendalikan oleh Syuriah. Sedangkan Tanfidziyah, yang biasanya diduduki oleh kalangan cendekiawan muslim, lebih banyak bertindak sebagai eksekutif dan pelaksana program. Lembaga Syuriah, merupakan dapur organisasi yang mengawasi dan menegur setiap tindakan yang dilakukan oleh Tanfidziyah. Para ulamalah yang menduduki jabatan-jabatan dalam Syuriah ini.

Seperti yang tertulis dalam Anggaran Rumah Tangga

26). Slamet Efendy Yusuf, Op Cit, halaman 23

27). Sholihin Hidayat, Harian Jawa Pos Surabaya, Kamis 18 November 1987, halaman 6

Nahdlatul Ulama, disebutkan tugas dan kewenangan Syuriah, antara lain sebagai berikut :

1. Setiap awal tahun Hijriyah memberikan pengarahannya dalam rapat pleno untuk menjabarkan program tahunan.
2. Setiap akhir tahun Hijriyah menerima dan mengevaluasi pelaksanaan program oleh Tanfidziyah.
3. Memberikan teguran, saran, dan bimbingan kepada seluruh perangkat organisasi.
4. Berhak membatalkan segala keputusan atau kebijakan organisasi yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. 28)

Dari empat point yang tertulis dalam anggaran rumah tangga NU itu, jelaslah bahwa ulama (baca : Syuriah) mempunyai peranan yang sangat vital dalam organisasi. Segala tindakan pelaksana (Tanfidziyah) akan diawasi oleh Syuriah, dan akan diberikan teguran manakala tindakan itu dinilai menyalahi ajaran Islam atau menyimpang dari garis organisasi. Bahkan, keputusan yang sudah diambil oleh pelaksana bisa saja dibatalkan, kalau Syuriah menganggap bertentangan dengan ajaran Islam.

Setiap awal tahun Hijriyah, Syuriah juga akan memberikan pengarahannya kepada Tanfidziyah untuk menyusun program tahunan, yang harus dikerjakan oleh eksekutif. Begitu juga pada akhir tahun, Syuriah akan memanggil Tanfidziyah untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap semua program

28). Lihat AD/ART Nahdlatul Ulama yang diterbitkan PBNU di Jakarta, 1985.

yang telah dan belum dilaksanakan.

Mengenai kewenangan Syuriah yang cukup luas ini, bisa juga dilihat dari salah satu bagian dari Keputusan Muktamar NU di Situbondo Desember 1984 lalu. Bunyi keputusan itu antara lain :

- Syuriah NU sebagai lembaga formal NU yang mencerminkan kepemimpinan ulama dalam jamiyah NU dipertegas kembali wewenangnya selaku pengendali, pemimpin, dan pengelola NU.
- Pengurus Syuriah dipilih oleh musyawarah Syuriah.
- Pengurus pelaksana (Tanfidziyah) dipilih oleh musyawarah Tanfidziyah dengan terlebih dahulu dimintakan persetujuan terhadap calon apengurus tersebut oleh pengurus Syuriah.
- Pengurus Tanfidziyah dapat diberhentikan oleh pengurus Syuriah bila Syuriah berpendapat bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jamiyah maupun agama, tanpa menunggu masa jabatannya selesai.
- Pengurus Syuriah berhak membekukan kepengurusan bila dianggap melanggar ketentuan syar'i maupun organisasi.²⁹⁾

Keputusan tersebut secara tegas telah menjelaskan dan merinci peranan dan kewenangan yang dimiliki oleh Pengurus Syuriah yang memang terdiri dari para ulama dan kiai. Dengan kata lain, ulama mempunyai posisi yang strategis dalam kepengurusan NU di semua tingkatan, mulai dari PB (pengurus besar atau pusat) sampai pengurus ranting (tingkat desa).

29). Keputusan Muktamar NU XXVII, Diterbitkan Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, 1985, halaman 25.

yang telah dan belum dilaksanakan.

Mengenai kewenangan Syuriah yang cukup luas ini, bisa juga dilihat dari salah satu bagian dari Keputusan Muktamar NU di Situbondo Desember 1984 lalu. Bunyi keputusan itu antara lain :

- Syuriah NU sebagai lembaga formal NU yang mencerminkan kepemimpinan ulama dalam jamiyah NU dipertegas kembali wewenangnya selaku pengendali, pemimpin, dan pengelola NU.
- Pengurus Syuriah dipilih oleh musyawarah Syuriah.
- Pengurus pelaksana (Tanfidziyah) dipilih oleh musyawarah Tanfidziyah dengan terlebih dahulu dimintakan persetujuan terhadap calon apengurus tersebut oleh pengurus Syuriah.
- Pengurus Tanfidziyah dapat diberhentikan oleh pengurus Syuriah bila Syuriah berpendapat bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jamiyah maupun agama, tanpa menunggu masa jabatannya selesai.
- Pengurus Syuriah berhak membekukan kepengurusan bila dianggap melanggar ketentuan syar'i maupun organisasi.²⁹⁾

Keputusan tersebut secara tegas telah menjelaskan dan merinci peranan dan kewenangan yang dimiliki oleh Pengurus Syuriah yang memang terdiri dari para ulama dan kiai. Dengan kata lain, ulama mempunyai posisi yang strategis dalam kepengurusan NU di semua tingkatan, mulai dari PB (pengurus besar atau pusat) sampai pengurus ranting (tingkat desa).

29). Keputusan Muktamar NU XXVII, Diterbitkan Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, 1985, halaman 25.

Di sisi lain, ulama atau kiai berfungsi sebagai pengendali, pemimpin dan pengelola Nahdlatul Ulama. Jamiyah ini memang distir dan dikemukakan oleh para ulama yang umumnya bercokol di pesantren-pesantren yang bertebaran di bumi Indonesia ini. Segala tindakan dan gerak langkah organisasi ini, berada dalam kepemimpinan ulama.

Pengurus Tanfidziyah, hanya dianggap sebagai pelaksana dari kepengurusan NU, yang segala tingkah lakunya harus berada di bawah pengawasan Pengurus Syuriah. Bahkan, Syuriah akan menggunakan ''veto''-nya kalau ada pengurus Tanfidziyah yang melanggar ketentuan organisasi maupun ketentuan agama. Bentuk veto itu bisa berupa pemberhentian atau pemecatan pengurus atau bahkan membekukan pengurus secara keseluruhan.

Nahdlatul Ulama, memang sebuah organisasi yang tidak bisa dipisahkan dengan para ulama yang umumnya mengasuh pesantren. Perkembangan NU sejak awal telah membuktikan betapa para kiai/ulama mempunyai peranan yang sangat besar.

''Pada hakekatnya, NU memang merupakan manifestasi modern dari kehidupan keagamaan, sosial, dan budaya para kiai. Dengan demikian, terkait di dalamnya semua unsur yang membentuk bangunan masyarakat, di mana kiai menjadi pusatnya''. 30)

30) Slamet Effendy Yusuf dkk, Op Cit, hal VII